

Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang

Yunnir Melany Kiu¹

¹ Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Nusa Cendana, Kupang. E-mail: yunnir.melany@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Increased income, business productivity, community independence, community economic empowerment program

Kata kunci: Peningkatan pendapatan, produktivitas usaha, kemandirian masyarakat, Program Dana PEM

How to cite: Kiu, Yunnir Melany. (2018). Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang, 4(2), 100-112

ABSTRACT

The Community Economic Empowerment Fund Program is a manifestation of the attention of the Kupang City Government in empowering the community by providing opportunities for the community to develop economic potential. This program is intended to improve the economic structure of the community by providing business capital through the Community Economic Empowerment Fund for the development of community economic enterprises. The purpose of this study was to determine the impact of the community economic empowerment fund program on community business development in Kayu Putih Village based on comparative before after evaluation studies using Thomas R. Dye's Theory of the dimensions of policy impacts covering 5 (five) dimensions namely the impact of policy on problems public problems and the people involved, the impact of policies on circumstances outside the policy goals or objectives, the impact of policies on current conditions and future conditions, the impact of policies on direct costs incurred to finance public policy programs and the impact of policies on costs indirect costs borne by the community or some community members due to public policies. This study used a qualitative descriptive approach with a qualitative descriptive data analysis tool. From the results of the study, it was found that the implementation of the community economic empowerment fund program in Kayu Putih Village produced a positive impact by the community in Kayu Putih Village because of an increase in community income, increased community business productivity, increased community independence, five times the rolling out of 2013 rolling out funds for Community Economic Empowerment for the Kayu Putih Village community and increasing public awareness with positive responses to community economic empowerment funds greatly helped develop community businesses.

Abstrak

Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomiannya. Program ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program dana pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap pengembangan usaha masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang berdasarkan studi evaluasi comparative before after dengan menggunakan Teori Thomas R. Dye tentang dimensi dampak kebijakan yang meliputi 5 (lima) dimensi yaitu Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan orang-orang yang terlibat, Dampak kebijakan terhadap keadaan diluar sasaran atau tujuan kebijakan, Dampak kebijakan pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, Dampak kebijakan pada biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan public dan Dampak kebijakan pada biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan public. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat analisis data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa Pelaksanaan program dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Kayu Putih menghasilkan dampak

positif oleh masyarakat di Kelurahan Kayu Putih karena terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, peningkatan kemandirian masyarakat, terlaksananya tahap pengguliran dari tahun 2013 hingga 2017 sebanyak lima kali pengguliran dana PEM bagi masyarakat Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan tanggapan positif bantuan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat membantu pengembangan usaha masyarakat.

Copyright © 2018 JAKPP. All rights reserved.

Pendahuluan

Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang diberikan kepada masyarakat adalah dana untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Beragam mata pencaharian penduduk di Kelurahan Kayu Putih berdasarkan hasil survei terdapat beberapa jenis usaha penerima dana PEM yaitu usaha kios, kantin sekolah, penjual ikan, salon, konveksi, kos-kosan, penjual kue, cuci motor, penjahit, toko, perbaikan kos-kosan, penjual sayur, penjual pulsa, penjual kayu bakar, peternakan ayam potong, warung makan dan meubel. Berdasarkan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.590 KK dengan jumlah penerima dana PEM selama 5 tahun sebanyak 292 pelaku usaha dengan persentasinya 19% dengan realisasi sebesar Rp. 1.008.181.000,- dan realisasi 57%. Terdapat perbandingan yang kurang signifikan sehingga fenomena inilah yang membuat calon peneliti ingin melakukan evaluasi dampak program dana PEM di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka masalah yang disajikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana dampak program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap pengembangan usaha masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang?. Berdasarkan uraian dan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis menetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terhadap pengembangan usaha masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang.

Kajian Literatur

Evaluasi Kebijakan

Dalam literatur evaluasi kebijakan atau program ada sejumlah konsep pokok yang harus dipahami, diantaranya: keluaran kebijakan (*policy outputs*), hasil kebijakan (*policy outcomes*), dampak kebijakan (*policy impacts*).

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan Pemerintah hendaknya perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan public dapat memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Laster dan Stewart (dalam Winarno, 2014:229) bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan dipandang sebagai

suatu kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Menurut William N Dunn (2003:608), secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Tahapan Kebijakan Publik

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan publik, Dunn mengemukakan beberapa tahap analisis yang harus dilakukan yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda
2. Tahap Formulasi Kebijakan
3. Tahap Adopsi Kebijakan
4. Tahap Implementasi Kebijakan
5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dilihat dari uraian diatas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa dalam perumusan kebijakan public tidaklah mudah. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan para pembuat kebijakan harus benar-benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.

Evaluasi Dampak Kebijakan

Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Akibat dari *output* kebijakan ada dua macam yakni:

- Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan atau tidak diharapkan) dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*).
- Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yg diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*).

Evaluasi dampak merupakan usaha menentukan dampak atas implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.

Dimensi dampak Kebijakan

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Thomas R. Dye (1972:354-

355) ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Objek yang dimaksud masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Dampak kebijakan terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Hal ini disebut efek eksternalitas, karena jumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas.
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang. Faktanya: Dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program seperti tersebut diatas, telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Dampak kebijakan terhadap biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Karena itu menurut Dye, penting untuk tidak mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah semata-mata mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka untuk mengetahui evaluasi terhadap manfaat program dana PEM maka dapat diketahui pemanfaatan dana PEM terhadap tujuan program.

Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.

Metode Evaluasi

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Subarsono (2009:128), untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih yakni:

- a. *Single program after - only* yaitu informasi diperoleh berdasarkan keadaan kelompok sasaran sesudah program dijalankan
- b. *Single program before - after* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan perubahan keadaan sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.
- c. *Comparative after - only* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan keadaan sasaran dan bukan sasaran program dijalankan.
- d. *Comparative before - after* yaitu informasi yang diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan.

Penelitian Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang menggunakan jenis evaluasi *Comparative before - after*. Penelitian jenis *Comparative before - after* yaitu peneliti mendapatkan informasi yang diperoleh berdasarkan dampak program terhadap

kelompok sasaran sebelum dan sesudah program dijalankan. Hal ini untuk mengetahui apakah ada dampak dalam pemberian dana PEM dan perubahan peningkatan keadaan setelah dilaksanakan kebijakan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tersebut.

Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Secara umum William Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Efektivitas
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b. Efisiensi
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. Perataan
Indicator ini berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. Responsivitas
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut Suhendra (2006:74-75) adalah "suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi". Sedangkan menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Metode Penelitian

Untuk mengetahui evaluasi dampak program dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (Moleong 2011:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif mampu menyesuaikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan informan, selain itu penelitian kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak perubahan. Menurut Milles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono (2013:334), menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Untuk mempersempit peneliti dalam proses kajian penelitian, maka fokus penelitian ini, yaitu :

1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat dengan sub fokus penelitian yaitu peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Kebijakan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan dengan sub fokus penelitian yaitu peningkatan produktivitas usaha masyarakat.
3. Dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan kondisi yang akan datang dengan sub fokus penelitian yaitu peningkatan kemandirian masyarakat.
4. Dampak kebijakan pada biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik dengan sub fokus penelitian yaitu pengguliran dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM).
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik dengan sub fokus penelitian yaitu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Program dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang

Dalam pelaksanaan program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Kayu Putih, maka terdapat aspek-aspek tinjauan penelitian dimana kesemua aspek tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian terhadap dampak program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013.

1. Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dana PEM adalah dana yang dialokasikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kota Kupang yang bersumber dari APBD Kota Kupang dalam bentuk hibah kepada LPM dan disalurkan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan harus dikembalikan kepada kas LPM yang selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kelemahan usaha ekonomi produktif masyarakat sebelum adanya dana PEM adalah lemahnya kapasitas usaha dari sisi permodalan, salah satu diakibatkan oleh kurangnya modal usaha dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat.

2. *Sumber daya manusia*

Sumber daya manusia dalam konteks program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah masyarakat dan pengelola Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di lapangan. Dalam pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdapat beberapa jenis usaha penerima dana PEM yaitu kios sembako, kantin sekolah, penjual ikan, salon, konveksi, kos-kosan, penjual kue, cuci motor, penjahit, toko, perbaikan kos-kosan, penjual sayur, penjual pulsa, penjual kayu bakar, peternakan ayam potong, warung makan dan meubel yang ditetapkan berdasarkan pengajuan proposal, hasil verifikasi dan reverifikasi administrasi faktual, survei tempat usaha.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang, jumlah penerima Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang terlibat dari tahun 2013-2017 kenyataan semakin meningkat tiap tahunnya sebanyak 292 orang pelaku usaha.

Keberadaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) juga merujuk pada fungsi fasilitator / pendamping selaku motor penggerak secara teknis dari program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) ditingkat lapangan. keberadaan jumlah pendamping tidak seimbang dengan jumlah penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) tersebut praktis akan berdampak pada rendahnya intensitas dampingan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan banyaknya jumlah penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada tahun 2013 dan tahun 2017 yang didampingi oleh 1 (satu) orang tenaga pendamping, maka tingkat kehadiran pendampingan dan pembinaan penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang rendah menyebabkan belum optimalnya fungsi pendamping selaku motor penggerak secara teknis dari program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang.

3. *Lingkungan Tempat Usaha*

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) Kota Kupang merupakan wujud perhatian Pemerintah Kota Kupang dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi perekonomian dengan maksud untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat dengan menyediakan modal usaha melalui Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bagi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan tujuan penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat berskala kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang disalurkan kepada

masyarakat Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang untuk digunakan sebagai modal usaha ekonomi masyarakat.

Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penerapan kebijakan pasti tidak lepas dari dampak yang diakibatkan dari penerapan kebijakan tersebut. Dampak (*impact*) merupakan akibat lebih jauh dari pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Tidak terkecuali pada kebijakan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang yang diberikan Pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat Kota Kupang yang telah memiliki usaha. Setelah dilaksanakannya program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang sejak tahun 2013-2017 memberikan dampak dari pelaksanaan program.

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pendapatan dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah keseluruhan yang didapatkan oleh penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai pelaku usaha di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang dari hasil pendapatan usaha yang semakin meningkat. Permasalahan kemiskinan yang sering dijumpai dan dialami masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang dikarenakan permasalahan modal usaha dan penghasilan yang cenderung pas-pasan. Sebelum adanya bantuan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang, masyarakat melakukan pinjaman ke koperasi harian yang memberikan bunga cukup tinggi. Keberhasilan Pemerintah dalam memberikan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, salah satunya peningkatan pendapatan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan modal mengembangkan usahanya.

Peneliti menemukan sebelum adanya kebijakan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang, pelaku usaha penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat merasa pendapatan mereka hanya mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari sehingga setelah Pemerintah melaksanakan kebijakan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada tahun 2013-2017 pelaku usaha mengalami peningkatan kesejahteraan sampai dengan dapat membeli alat transportasi dan merenovasi tempat usaha dari hasil usahanya.

2. Peningkatan produktivitas usaha masyarakat

Peningkatan produktivitas usaha di kelurahan kayu putih sebelum adanya kebijakan pemerintah tentang bantuan dana PEM, produktivitas masyarakat di kelurahan tersebut belum berkembang yang mana produktivitas dari usaha yang dimiliki masyarakat tidak bervariasi.

Dengan adanya program bantuan pemerintah tentang dana PEM yang dilaksanakan pada tahun 2013 hingga sekarang, produktivitas usaha masyarakat mengalami peningkatan yang mana awalnya masyarakat hanya memiliki satu

usaha saja dan setelah adanya program dana PEM, masyarakat telah memiliki produktivitas usaha lainnya.

Selain itu, hasil dari pengelolaan bantuan dana PEM tersebut dapat dimanfaatkan pula untuk mengembangkan usaha masyarakat seperti salah satu pelaku usaha penjualan ikan kering yang sudah mengembangkan usahanya selain usaha utama dalam bentuk jual gula merah, bawang merah dan bawang putih sampai ke luar Kota Kupang.

3. *Peningkatan kemandirian masyarakat*

Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah.

Dana PEM merupakan bantuan modal usaha tanpa bunga pinjaman, oleh karena itu masyarakat harus dapat mengelola dana bantuan tersebut dengan baik sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri tanpa bergantung pada bantuan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih dibutuhkannya peran pendamping atau fasilitator yang akan mempercepat proses pemberdayaan sehingga bernilai tinggi, serta proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberhasilan dalam usaha yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendamping/fasilitator di Kelurahan Kayu Putih hanya terdapat 1 (satu) orang pendamping saja sedangkan masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebanyak 292 orang. Hal tersebut merupakan perbandingan yang tidak seimbang dimana pendamping tidak dapat melakukan perannya secara menyeluruh kepada masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sehingga terdapat masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang mengalami tunggakan dalam pengembalian dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat karena berbagai faktor antara lain: usaha yang mengalami kemacetan, alamat tidak jelas, pindah alamat, meninggal dan mengalami kebangkrutan usaha.

4. *Pengguliran dana*

Pemberian bantuan dana PEM dalam 2 tahap yaitu penyaluran dan pengguliran. Penyaluran dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali yang merupakan dana hibah oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini bantuan yang diberikan kepada kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang salah satunya adalah Kelurahan Kayu Putih. Sedangkan pengguliran dilakukan ketika dana penyaluran yang diberikan kepada penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat telah di setor kembali dan mencapai 25% dapat dilakukan

pengguliran. masyarakat penerima dana PEM yang sudah melunasi tepat waktu atau dalam jangka waktu 18 diberikan kesempatan mendapatkan pengguliran dana.

5. Peningkatan kesadaran masyarakat

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih yaitu Pemerintah melakukan pendekatan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilakukan dengan pendekatan Tribina yang bersifat komplementer dan simultan yakni bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut Pemerintah bermaksud agar masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa bantuan Pemerintah melalui program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ini sangat penting karena dapat mengembangkan usahanya jika dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan prinsip *Comparatif Before After* sudah berjalan dengan baik di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang sejak tahun 2013 sampai sekarang dan 292 masyarakat penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam Program Dana PEM. Hasil evaluasi dampak Program Dana PEM didasarkan pada : dimensi *pertama*; dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan kebijakan pada orang-orang yang terlibat, *kedua*; dampak kebijakan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan, *ketiga*; dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan kondisi yang akan datang, *keempat*; dampak kebijakan pada biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik dan *kelima*; dampak kebijakan pada biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Kesemua dimensi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Faktor sumber daya manusia dan faktor lingkungan tempat usaha menunjukkan tercapainya kebijakan Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan adanya tanggapan positif, kritik dan saran memperlihatkan tingginya partisipasi masyarakat pelaku usaha terhadap program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang.
2. Dari hasil evaluasi kebijakan program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang, ditemukan dampak antara lain :
 - a) Peningkatan pendapatan masyarakat pelaku usaha dan kebutuhan keluarga;
 - b) Peningkatan produktivitas usaha masyarakat yaitu barang dagangan menjadi lebih bervariasi dan memiliki usaha yang lain dari usaha yang sudah ada sebelumnya;

- c) Peningkatan kemandirian masyarakat terdapat masyarakat yang sudah mandiri dan belum mandiri dimana masyarakat mengalami tidak lancar, tidak tepat waktu dan macet dalam pengembalian pinjaman.
- d) Peningkatan kesadaran masyarakat yaitu tanggapan positif bantuan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sangat membantu pengembangan usaha masyarakat;
- e) Pengguliran Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu masyarakat diberikan kesempatan mendapatkan bantuan pada tahap penyaluran dan pengguliran dana.
- f) Kurangnya pendamping/fasilitator dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- g) Masyarakat sangat membutuhkan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, Saleh. 2007. *Prinsip-prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indah
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Dye Thomas R., *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1972, pp. xii, 305.
- Fernandes, H.J.X. 1984. *Evaluation of educational programs*. Jakarta: National Education Planning, Evaluation and Cultural Development.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Kartasasmita, Ginandjar. 1995. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*; Jakarta: CIDES.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Nurbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Soeprapto. 2000. *Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soetomo. 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.
- Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Stufflebeam, D.L. H McKee and B McKee. 2003. *The CIPP Model for Evaluation*. Paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN). Portland, Oregon.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

—————.2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CPAS

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012 ISSN : 2086
- 5031

Jurnal Ilmiah PENJAS, ISSN : Model Evaluasi, Evaluasi Program, Penelitian
Evaluasi: 2442-3874 Vol.3 No.1, Januari 2017

Badan Pusat Statistik. (2017). BPS Provinsi NTT

Badan Pusat Statistik (2016). BPS Kota Kupang

Keputusan Walikota Kupang No. 1/Kep/HK/2014 tentang Perubahan atas
Keputusan Walikota Kupang No. 15A/Kep/HK/2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota
Kupang

Peraturan Menteri Keuangan 218/PMK. 05/2009 pasal 1 ayat 1 Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 Tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Bergulir PadaKementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.